PENGARUH TOTAL ASSET PEMERINTAH, DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN JUMLAH ANGGOTA DPRD TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Nama : Muhammad Arif Wijaya
NIM : 222014008

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

PENGARUH TOTAL ASSET PEMERINTAH, DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN JUMLAH ANGGOTA DPRD TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Muhammad Arif Wijaya
NIM : 222014008

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammmad Arif Wijaya

NIM : 22 2014 008

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis,

Muhammad Arif Wijaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah

Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Pengaruh Total Asset Pemerintah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Jumlah Anggota DPRD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan.
Nama	: Muhammad Arif Wijaya
NIM	: 222014008
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,

Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 020604630/784021

Pembimbing II,

Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM : 020647101/859196

Mengetahui,

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang paling mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”(QS.Al-Baqarah: 216).

“Selalu berdoa dan berusaha untuk menggapai cita-cita dan harapan dimasa depan.”(Muhammad Arif Wijaya)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku
- Saudara-saudariku tersayang
- Pembimbing skripsiku
- Teman-teman seperjuangan angkatan 2014
- Almamater kebanggaanku

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat atas segala berkah dan rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Total Asset Pemerintah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Anggota DPRD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan**.** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda Dobhan Sanusi dan Ibunda Susilawati tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli,S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si, Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si selaku pembimbing satu yang telah banyak membantu dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing kedua yang telah banyak membantu dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Maret 2019

Penulis

Muhammad Arif Wijaya

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO ..... **v**

HALAMAN PRAKATA ..... **vi**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **viii**

HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xii**

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACK ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

1. Manfaat bagi Penulis 9

2. Manfaat bagi Perusahaan 9

3. Manfaat bagi Almamater 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA **10**

A. Landasan Teori 10

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 10
2. Kinerja 11
3. Asset Pemerintah 14
4. Dana Alokasi Umum 18
5. Pendapatan Asli Daerah 20
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 22
7. Keterkaian Variabel 23
B. Penelitian Sebelumnya 26
C. Kerangka Pemikiran 30
D. Hipotesis 31
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis Penelitian 32
B. Lokasi Penelitian 33
C. Operasionalisasi Variabel 33
D. Populasi dan Sampel 34
E. Data yang Digunakan 36
F. Metode Pengumpulan Data 37
G. Analisis Data dan Teknik Analisis 38
1. Analisis Data 38
2. Teknik Analisis 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49
A. Hasil Penelitian 49
1. Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan 49

a. Sejarah Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan.....49
b. Visi dan Misi.....50
c. Tugas Pokok.....51
d. Fungsi 51
2. Gambaran Umum Sumatera Selatan.....51
a. Sejarah Sumatera Selatan.....51
b. Letak Geografis.....52
c. Demografi 54
3. Hasil Penghitungan Statistik.....56
a. Statistik Deskriptif.....56
b. Uji Asumsi Klasik.....61
c. Uji Regresi Linear Berganda 65
d. Uji Koefisien Determinasi 70
e. Uji Hipotesis 71
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....73
1. Pengaruh Total Aset terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 75
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 75
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 77
4. Pengaruh jumlah Anggota DPRD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 78

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 80

A. Simpulan 80

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Total Asset, PAD, DAU, jumlah anggota DPRD dan Pendapatan Kabupaten/kota di Sumatera Selatan 6
Tabel I.II Rasio Derajat Desentralisasi 7
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya 29
Tabel III.I Operasionalisasi variabel 33
Tabel III.2 Populasi Penelitian 34
Tabel III.3 Seleksi Sample 35
Tabel III.4 Sample 36
Tabel IV.1 Statistik Deskriptif. 57
Tabel IV.2 Uji Multikolinieritas. 63
Tabel IV.3 Uji Autokorelasi 63
Tabel IV.4 Uji Regresi Linier Berganda 65
Tabel IV.7 Uji Determinasi. 71
Tabel IV.5 Uji F (Simultan) 72
Tabel IV.6 Uji T (Parsial) 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 30
Gambar IV.1 Uji Normalitas 61
Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Riset
Lampiran 2 : Sertifikat TOEFL
Lampiran 3 : Sertifikat AIK
Lampiran 4 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 5 : Lembar Persetujuan Skripsi
Lampiran 5 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Muhammad Arif Wijaya/222014008/2019/Pengaruh Total Asset Pemerintah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Anggota DPRD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh total asset pemerintah, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan jumlah anggota DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh total asset pemerintah, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan jumlah anggota DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama varibel total asset pemerintah, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan jumlah anggota DPRD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Hasil uji secara parsial diketahui bahwa variabel total asset pemerintah, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan jumlah anggota DPRD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah,

Kata kunci : Asset, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Anggota DPRD, Kinerja Keuangan

Abstract

Muhammad Arif Wijaya / 222014008/2019 /The Effect of Total Government Assets, General Allocation Funds, Regional Original Revenue and Number of DPRD Members on Financial Performance of Kabupaten / City in South Sumatra / Public Sector Accounting.

The formulation of the problem in this research was how the influence of total government assets, general allocation funds, regional original income and the number of DPRD members on the financial performance of Kabupaten / city in South Sumatra. This study aimed to determine the effect of total government assets, general allocation funds, regional original income and the number of DPRD members on the financial performance of kabupaten / city in South Sumatra. This study used an associative type of research. The data collection technique used in this study was document analysis. Analysis of the data used was quantitative analysis. The results of the study showed that simultaneously the total government asset variables, general allocation funds, local revenue and the number of DPRD members gave the effect on the financial performance of Kabupaten / city in South Sumatra. The partial test results showed that the variables of total government assets, general allocation funds, local revenue, and the number of DPRD members gave a significant effect on the government's financial performance,

Keywords: Assets, General Allocation Funds, Regional Original Income, DPRD Members, Financial Performance

PENGESAHAN
NO. 146/Abstract LB/UMP/III/19
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara baik, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Sebagai implikasinya, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaran pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding era sebelumnya. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada pendapatan asli daerah. Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel dan transparan, tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada pendapatan asli daerah yang dimiliknya.

Menurut Wempy (2017: 90) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kebijakan otonomi daerah dalam realisasinya masih banyak persoalan dan kendala implementasi, yang disebabkan oleh Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas, aturan pelaksanaannya yang selalu berubah serta kepentingan politik lebih dominan dari pada kepentingan ekonomi atau lainnya. Maka dari itu pemerintah harus pandai

menyelenggarakan pemerintahannya dan melakukan evaluasi secara berkala, terhadap kinerjanya sehingga dapat tercapai pemerintahan yang baik.

Mahsun (2016: 25) kinerja keuangan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi..Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.Kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. Ketiga,untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan ,ndekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Mardiasmo,2009: 122). Maka dari itu perlu dilakukan nya pengukuran kinerja terhadap pemerintah daerah, agar kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, khususnya kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu seperti *leverage*, belanja daerah, temuan

audit BPK, total asset pemerintah daerah, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, jumlah anggota DPRD, dan lain sebagainya

Peneliti akan menguji tentang kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat diperkirakan dapat dipengaruhi oleh total asset pemerintah daerah, dana alokasi umum , pendapatan asli daerah, dan jumlah anggota DPRD.

Menurut Abdul Halim (2014: 118) asset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.

Menurut Abdul Halim (2014: 40), DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan (Gita Maiyora, 2015) menunjukkan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, variabel Intergovermental Revenue yang diproksikan menggunakan dana alokasi umum juga menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, variabel pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, dan variabel ukuran legislatif menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera.

Berbeda dengan penelitian (Ratna Ayu Minarsih, 2015) yang mengatakan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total asset tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian (Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak, 2018) dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo. Penelitian (Indah Puspa Sari, 2016) menunjukkan adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota pulau Sumatera. Penelitian lain yang dilakukan oleh Media Kusumawardani (2012), dengan variabel ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hasilnya menunjukkan adanya pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Berikut adalah kabupaten/kota yang mempublikasikan laporan keuangan dan anggota DPRD kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1

Total Asset, PAD, DAU, Jumlah Anggota DPRD, pendapatan,

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

(dalam jutaan rupiah)

N0	Kab/Kota	Tahun	Total Aset	DAU	PAD	DPRD	Pendapatan
1	Lahat	2014	3.169.864	615.240	125.319	40	1.534.399
		2015	2.636.999	622.781	189.584	40	1.657.846
		2016	2.772.653	703.887	184.972	40	1.726.004
2	Musi Banyuasin	2014	10.218.372	411.869	172.924	45	3.143.669
		2015	6.814.157	131.033	181.795	45	2.034.401
		2016	7.564.834	324.837	169.012	45	2.640.255
3	Musi Rawas	2014	4.787.452	420.562	120.152	40	1.141.591
		2015	3.462.645	578.786	97.998	40	1.315.816
		2016	3.432.745	641.789	96.743	40	1.617.409
4	Muara Enim	2014	5.125.465	593.564	138.705	45	1.797.920
		2015	4.381.953	610.384	178.245	45	1.980.003
		2016	4.616.358	673.162	150.912	45	2.049.002
5	Ogan Komering Ilir	2014	4.004.729	931.158	145.590	45	1.577.431
		2015	4.534.111	958.999	110.225	45	1.653.377
		2016	3.314.522	1.049.995	108.992	45	1.979.249
6	Ogan Komering Ulu	2014	3.930.664	568.771	79.344	35	1.083.700
		2015	3.281.774	568.562	98.756	35	1.034.793
		2016	2.595.601	635.551	87.578	35	1.192.981
7	Palembang	2014	6.937.237	1.203.662	734.218	50	2.929.034
		2015	6.391.429	1.210.604	736.926	50	2.871.899
		2016	7.493.109	1.292.124	781.413	50	3.122.903
8	Prabumulih	2014	1.818.626	383.313	64.169	25	875.614
		2015	2.440.907	406.701	72.236	25	816.654
		2016	2.514.674	414.173	86.253	25	940.737
9	Pagar Alam	2014	2.145.104	354.727	13.909	25	804.083
		2015	1.662.530	351.582	53.418	25	747.658
		2016	1.863.162	390.188	51.113	25	814.062
10	Lubuk Linggau	2014	2.090.903	414.757	50.181	30	919.070
		2015	2.221.375	415.549	66.725	30	821.900
		2016	2.300.506	446.789	75.797	30	883.629
11	Ogan Ilir	2014	2.710.143	561.376	49.061	40	1.071.163
		2015	2.176.935	557.402	42.843	40	1.073.724
		2016	2.251.240	623.839	109.762	40	1.243.190
12	Oku Timur	2014	2.138.556	680.713	62.418	45	1.212.512
		2015	1.644.832	693.714	64.280	45	1.298.375
		2016	2.009.546	760.211	69.357	45	1.521.770
13	Empat Lawang	2014	1.555.802	360.871	32.656	35	781.397
		2015	1.558.185	366.775	27.118	35	728.699
		2016	1.768.750	416.952	22.347	35	801.728

Sumber: *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik,2019*

Table 1.2

Persentase Kinerja Keuangan (Rasio Derajat Desentralisasi) Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan

No	Kabupaten/kota	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Lahat	8,17%	11,44%	10,72%
2	Musi Banyuasin	5,50%	8,94%	6,40%
3	Musi Rawas	10,53%	7,45%	5,98%
4	Muara Enim	7,71%	9,00%	7,37%
5	Ogan Komering Ilir	9,23%	6,67%	5,51%
6	Ogan Komering Ulu	7,32%	9,54%	7,34%
7	Palembang	25,07%	25,66%	25,02%
8	Prabumulih	7,33%	8,85%	9,17%
9	Pagar Alam	1,73%	7,14%	6,28%
10	Lubuk Linggau	5,46%	8,12%	8,58%
11	Ogan Ilir	4,58%	3.99%	8,83%
12	OKU Timur	5,15%	4,95%	4,56%
13	Empat Lawang	4,18%	3,72%	2,79%

Sumber : Data yang diolah, 2019

Dilihat dari tabel kinerja keuangan, kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan disetiap tahunnya seperti tahun 2016 sebesar 2,79%, hal ini diikuti dengan penurunan pendapatan asli daerah ditahun yang sama sebesar 22.347, kondisi tersebut tidak baik bagi suatu kabupaten/kota. Sedangkan kota Prabumulih kinerjanya sangat baik karena mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti tahun 2016 sebesar 9,17%, hal ini diikuti dengan peningkatan pendapatan asli daerah nya ditahun yang sama sebesar 86.253, sehingga diharapakan semua kabupaten/kota juga dapat

meningkatkan pendapatan asli daerahnya agar kinerja keuangannya semakin meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Total Asset Pemerintah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Anggota DPRD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh total asset pemerintah, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan jumlah anggota DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh total asset pemerintah, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah daan jumlah anggota DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Meningkatkan pemahaman tentang pengaruh total asset pemerintah, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah daan jumlah anggota DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

2. Bagi Lokasi Penelitian

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebagai bahan inormasi bagi pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan pengaruh total asset pemerintah, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan jumlah anggota DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di sumatera selatan.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bacaan bagi mahasiswa dan mahasiswi agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan informasi atau masukan untuk penelitian lebih lanjut

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-4. Salemba Empat. Jakarta

Gita Maiyora. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Darah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera). Jom FEKON Vol.2 No.2

Indah Puspa Sari. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, *Leverage*, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon3(1).*

Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Kusumawardani, M. 2012. Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1 (1).

Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi ke-6.BPFE. Yogyakarta

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Cv. Andi Offset.Yogyakarta.

Mathius, Tandiontong. 2016. *Kualitas Audit Dan Pengukurannya*. Alfabeta. Bandung.

Minarsih, R. A. 2015. Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Leverage* Dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Mustikarini dan Fitriasari. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan.*

Peraturan menteri keuangan nomor 270/PMK.05/2014 tentang *standar akuntansi berbasis akrual*

Suhardjanto, Djoko, Rena Rukmita Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing Universitas Sebelas Maret. 8(1):1-94.

Sari, I. P. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, *Leverage*, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Pulau Sumatra). JOM Fekon3(1).

Syofian Siregar. (2015). *Statistik Parametrik* untuk penelitian kuantitatif. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *perimbangan keuangan anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.*

V Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan pertama. PT. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

V Wiratna, Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Cetakan Pertama. PT. Pustaka Baru Press.Yogyakarta.

Wempy, Banga. 2017. *Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.

www.djpk.depkeu.go.id.

www.bps.sumsel.co.id.